



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Februari 2017

Halaman: 13



Massa yang tergabung dalam Jaringan Pemilih Pemula (JPP) melakukan aksi teatrikal di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Selasa (31/1). Aksi dengan membakar 1.000 amplop tersebut

sebagai bentuk penolakan terhadap praktik politik uang menjelang Pilwalkot Jogja.

► PILKADA BERSIH

Politik Uang seperti Rentenir

TEGALREJO—Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Pemilih Pemula (JPP) Jogja melakukan aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja di Jalan Magelang, Tegalrejo, Jogja, Selasa (31/1).

Dalam aksi tersebut, JPP membakar seribu amplop sebagai simbol menolak politik uang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) pada 15 Februari mendatang.

Mereka menyamakan politik uang dengan praktik rentenir atau lintah darat yang membagi-bagikan uang, kemudian dalam memerintah akan

cenderung mencari uang sehingga program kesejahteraan rakyat bisa terabaikan.

"Kami mengimbau kepada calon kepala daerah dan elite politik untuk tidak menggunakan politik uang dalam meraih dukungan," kata Ardy Syihab, salah satu pegiat JPP Jogja, di sela-sela aksi.

Ardy mengatakan dalam penyelenggaraan pilkada lekat dengan politik uang. Padahal praktik politik uang dapat mencederai demokrasi. Selain itu juga, kepala daerah yang terpilih dengan cara-cara curang berpotensi merugikan masyarakat.

Ardy juga mengajak penyelenggara pilkada untuk sama-sama memerangi politik uang dan menciptakan pilkada yang bersih.

Anggota Pengawas Pemilu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Ferdian turut menyuarakan dalam aksi tersebut. Ia mengajak semua masyarakat Kota Jogja untuk sama-sama mensukseskan Pilwalkot agar bebas dari politik uang. "Saatnya kita berani mengawasi dan berani melaporkan jika terjadi pelanggaran," kata Iwan.

Ia mengingatkan dalam Undang-Undang Pilkada No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota ditegaskan soal sanksi berat terhadap pelaku politik uang dengan kurungan 36 bulan sampai 72 bulan penjara dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar. "Sanksi ini bisa menjerat pemberi dan penerima uang," kata Iwan.

Komisiner KPU Kota Jogja Sri Surani menegaskan komitmen lembaganya untuk menyelenggarakan Pilwalkot Jogja yang bersih, transparan, dan kredibel. Ia mengajak masyarakat untuk berani menolak segala bentuk politik uang. Tidak hanya uang, namun semua jenis pemberian dengan maksud mempengaruhi pilihan suara. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005